



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 188-401.040/12/2022
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA)
KOTA MADIUN TAHUN 2023**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pembentukan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu dan sistematis dengan memperhatikan serta mempertimbangkan kebutuhan, skala prioritas dan kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perencanaan pembentukan peraturan daerah dilakukan dalam suatu Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, maka perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kota Madiun Tahun 2023 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam

lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kota, dan Kabupaten;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Program

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur;

11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD No 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Madiun;

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Dengar Pendapat antara Bapemperda DPRD Kota Madiun dengan Tim Harmonisasi dan Pembahasan Raperda Pemerintah Kota Madiun dan seluruh OPD pada tanggal 22 Juli 2022 dengan acara Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kota Madiun Tahun 2023;
 2. Berita Acara tanggal 22 Juli 2022 Nomor 188/8/401.040/2022 dan Nomor 188/4/401.013/2022 tentang Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kota Madiun Tahun 2023;
 3. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 29 Juli 2022 Nomor 188/28635/013.2/2022 Perihal Hasil Konsultasi Propemperda Kota Madiun Tahun 2023;
 4. Surat Ketua Bapemperda DPRD Kota Madiun tanggal 2 Agustus 2022 Nomor 7/Bapemperda/VIII/2022 Perihal Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kota Madiun Tahun 2023;
 5. Surat Walikota Madiun tanggal 2 Agustus 2022 Nomor 180/3927/401.013/2022 Perihal Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kota Madiun Tahun 2023;
 6. Hasil Rapat Dengar Pendapat antara Bapemperda DPRD Kota Madiun dan Tim Harmonisasi dan Pembahasan Raperda Pemerintah Kota Madiun dan OPD terkait pada

tanggal 2 Agustus 2022 dengan acara membahas Hasil Konsultasi Gubernur Jawa Timur atas Propemperda Kota Madiun Tahun 2023;

7. Nota Kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dan Pemerintah Kota Madiun tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kota Madiun Tahun 2023 tanggal 3 Agustus 2022 Nomor 188/5/401.013/2022 dan Nomor 188/12/401.040/2022;
8. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 3 Agustus 2022 dengan acara Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kota Madiun Tahun 2023;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kota Madiun Tahun 2023 berjumlah 15 (lima belas) Raperda yang terdiri dari 9 (sembilan) Raperda usulan Pemerintah Kota Madiun dan 6 (enam) Raperda Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kota Madiun Tahun 2023 sebagai berikut:
- a. Raperda yang berasal dari Walikota Madiun meliputi:
 1. Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 2. Raperda tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;
 3. Raperda tentang Pengendalian Minuman Beralkohol;
 4. Raperda tentang Pengelolaan Sampah;

5. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Rumah Kos/Pemondokan;
 6. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2012 tentang Usaha Pariwisata;
 7. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 8. Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; dan
 9. Raperda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- b. Raperda yang berasal dari DPRD Kota Madiun meliputi:
1. Raperda tentang Kerjasama Daerah;
 2. Raperda tentang Penyelenggaraan Pesantren;
 3. Raperda tentang Penyelenggaraan Literasi Digital Masyarakat;
 4. Raperda tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
 5. Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif; dan
 6. Raperda tentang Pemberdayaan Organisasi Masyarakat.

KETIGA : Pokok-pokok pikiran atau keterangan Rancangan Peraturan Daerah yang akan diusulkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kota Madiun Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) sebagaimana dimaksud Diktum “KEDUA” merupakan hasil koordinasi dan kesepakatan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dan Pemerintah

Kota Madiun sebagai pedoman dalam melaksanakan pembentukan Peraturan Daerah.

KELIMA : Dalam keadaan tertentu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun atau Pemerintah Kota Madiun dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) sebagaimana dimaksud dalam Diktum “KEDUA”, karena alasan:

1. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
2. menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain;
3. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun;
4. akibat pembatalan oleh Mahkamah Agung untuk Perda; dan
5. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) ditetapkan.

KEENAM : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum “KEEMPAT” selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) tahun berkenaan.

KETUJUH : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 3 Agustus 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

